



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DITJEN PDSPKP TAHUN PELAPORAN 2025

Sehubungan dengan adanya pergantian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) pada tanggal 12 Juni 2026, bersama ini disampaikan bahwa **penayangan** Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2025 tetap mengacu pada status kewajiban pelaporan LHKPN masing-masing pejabat. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat penjelasan sebagai berikut:

1



DIREKTUR PENGOLAHAN

masih menampilkan data pejabat sebelumnya, yaitu **Tri Aris**, karena pejabat yang baru, **Budi Yuwono**, merupakan pejabat hasil promosi sehingga belum memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2025.

2



DIREKTUR PEMBERDAYAAN USAHA

masih menampilkan data pejabat sebelumnya, yaitu **Catur Sarwanto**, karena pejabat yang baru, **Ali Rahmat Iman Santoso**, dilantik pada tahun 2026 sehingga belum memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2025.

3



DIREKTUR PRASARANA DAN SARANA

belum memiliki data LHKPN Tahun Pelaporan 2025 karena jabatan tersebut sebelumnya belum terisi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), sedangkan pejabat yang baru, **Achmad Al Farisi**, baru dilantik pada tahun 2026 sehingga belum memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN Tahun Pelaporan 2025.



Demikian pengumuman ini disampaikan sebagai penjelasan atas penayangan LHKPN Ditjen PDSPKP Tahun Pelaporan 2025.



www.kkp.go.id



[ditjenpdspkp](#)



Direktorat Jenderal PDSPKP



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN

UNIT KERJA :
DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWIN DWIYANA
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 893629

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/144 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 284.000.000

1. MOBIL, TOYOYA NAV1 2.O V A/T MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY F1CO2N28LO SEPEDA MOTOR Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, VESPA PRIMAVERA IGET 150 ABS A/T SCOOTER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150 ABS / SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 168.188.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 38.409.342

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.240.597.342

III. HUTANG Rp. 119.673.799

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.120.923.543

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MACHMUD
2. Jabatan : SEKRETARIS DITJEN
3. NHK : 202776

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/54 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/35 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m²/90 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m²/36 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 174.300.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
2. MOBIL, HONDA BRV ET MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 50.000.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 28.620.929

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.802.920.929
III. HUTANG	Rp.	404.983.154
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.397.937.775

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CATUR SARWANTO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 638600

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 739.535.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 329.535.000
2. Tanah Seluas 1.250 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/24 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 205.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, HONDA BRV PRAGTIGE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 107.800.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 127.903.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 361.957.338

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.542.195.338

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.542.195.338

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TRI ARIS WIBOWO**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **455179**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/215 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/65 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 82.000.000**

1. MOBIL, GRAND LIVINA MPV Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA REVO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA SUPRA X Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 405.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 686.568.000**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**



Sub Total	Rp.	3.323.568.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.323.568.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KUN HAQ AULIA SUNARANING DIMAS
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 1000535

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	19.000.000
1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	
12.000.000		
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI	Rp.	
7.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	90.622.500
D. SURAT BERHARGA	Rp.	117.341.118
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	53.592.828
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	280.556.446
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	280.556.446

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.